IMPLEMENTASI STANDAR PRAKTIK KEPERAWATAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Hotmaria Hertawaty Sijabat

Doctoral Student Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia
sjabathotmaria@gmail.com

Abstract

The implementation of nursing practice standards in Indonesia has been regulated in various laws and regulations, such as Law No. 38 of 2014 concerning Nursing and its implementing regulations. These standards aim to ensure the quality of nursing services, patient safety, and legal protection for nurses and the community. However, implementation in the field still faces various challenges, such as disparities in nurses' competencies, limited facilities, insufficient supervision, and an inadequate documentation and evaluation system. Efforts to improve implementation include strengthening education and training, digitising nursing documentation, harmonising regulations, and fostering cross-sectoral collaboration between the government, professional organisations, and educational institutions. With shared commitment and adaptive regulatory updates, the implementation of nursing practice standards is expected to run optimally and sustainably, thereby enhancing the quality of healthcare services in Indonesia.

Keywords: *nursing practice standards, regulations, implementation, service quality, legal protection.*

Abstrak

Implementasi standar praktik keperawatan di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan dan peraturan pelaksanaannya. Standar ini bertujuan untuk menjamin mutu pelayanan keperawatan, keselamatan pasien, serta perlindungan hukum bagi perawat dan masyarakat. Namun, penerapan di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti disparitas kompetensi perawat, keterbatasan fasilitas, kurangnya supervisi, serta belum optimalnya sistem dokumentasi dan evaluasi. Upaya peningkatan implementasi dilakukan melalui penguatan pendidikan dan pelatihan, digitalisasi dokumentasi keperawatan, harmonisasi regulasi, serta kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, organisasi profesi, dan institusi pendidikan. Dengan komitmen bersama dan pembaruan regulasi yang adaptif, implementasi standar praktik keperawatan diharapkan dapat berjalan optimal dan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia.

Kata kunci: standar praktik keperawatan, peraturan perundang-undangan, implementasi, mutu pelayanan, perlindungan hukum.

Pendahuluan

Praktik keperawatan merupakan salah satu pilar utama dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan kesehatan, profesi keperawatan dituntut untuk senantiasa mengedepankan standar praktik yang aman, efektif, dan etis dalam menjalankan tugasnya. Standar praktik keperawatan menjadi pedoman penting yang harus dipegang oleh setiap perawat agar dapat memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas dan melindungi hak-hak pasien (Rahayu, 2023).

Standar praktik keperawatan di Indonesia telah mengalami perkembangan sejalan dengan dinamika profesi dan kebutuhan masyarakat. Pada awalnya, praktik keperawatan di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan yang diwariskan dari masa penjajahan, sehingga belum memiliki standar yang baku dan terintegrasi. Namun, dengan berkembangnya profesi keperawatan dan terbentuknya organisasi profesi seperti Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), upaya untuk merumuskan dan menerapkan standar praktik keperawatan mulai dilakukan secara sistematis (Amir & Purnama, 2021).

Menurut Dewan Pertimbangan Pusat PPNI, standar praktik keperawatan merupakan komitmen profesi keperawatan dalam melindungi masyarakat terhadap praktik yang dilakukan oleh anggota profesi. Standar ini berfungsi sebagai batas ukuran baku minimal yang harus dilakukan perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan. Dengan adanya standar, praktik keperawatan dapat diarahkan, dituntun, dan dievaluasi untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan dan kebutuhan klien (Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), 2025).

Fokus utama dari standar praktik keperawatan adalah klien atau pasien. Standar ini digunakan untuk mengetahui proses dan hasil pelayanan keperawatan yang diberikan, sehingga dapat dievaluasi apakah intervensi yang dilakukan telah sesuai dengan rencana dan tujuan yang diharapkan. Standar praktik keperawatan juga menjadi alat ukur kualitas pelayanan yang diberikan oleh perawat, baik di rumah sakit, puskesmas, maupun fasilitas kesehatan lainnya (Gillies, 2025). Dalam penyusunan standar praktik keperawatan, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan, antara lain pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif didasarkan pada pendapat ahli dan pola praktik profesional, sedangkan pendekatan empiris didasarkan pada hasil penelitian dan praktik keperawatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kedua pendekatan ini saling melengkapi dalam merumuskan standar yang aplikatif dan relevan dengan kebutuhan di lapangan (Purba, 2020).

Implementasi standar praktik keperawatan di Indonesia tidak terlepas dari dukungan peraturan perundang-undangan. Salah satu tonggak penting adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, yang secara khusus mengatur praktik keperawatan, pendidikan, registrasi, dan perlindungan hukum bagi perawat. Undang-undang ini menjadi landasan yuridis yang memperkuat posisi

perawat dalam memberikan pelayanan dan menjamin kepastian hukum bagi profesi keperawatan (Infokom DPP PPNI, 2023).

Selain itu, standar praktik keperawatan juga diatur dalam berbagai peraturan pelaksana, seperti peraturan menteri kesehatan dan regulasi organisasi profesi. Standar ini meliputi berbagai aspek, mulai dari pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, pelaksanaan tindakan, hingga evaluasi hasil asuhan keperawatan. Setiap tahapan tersebut memiliki kriteria dan indikator yang jelas, sehingga dapat diukur dan dievaluasi secara obyektif (PPNI, 2021).

Penerapan standar praktik keperawatan memberikan manfaat ganda, baik bagi perawat maupun pasien. Bagi perawat, standar ini memberikan pedoman kerja yang jelas, meningkatkan profesionalisme, dan memberikan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas. Bagi pasien, standar praktik keperawatan menjamin bahwa pelayanan yang diterima telah memenuhi syarat mutu dan keselamatan yang ditetapkan oleh regulasi. Namun, implementasi standar praktik keperawatan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan (Subekti, 2024). Beberapa di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman perawat terhadap standar, serta belum optimalnya pengawasan dan pembinaan dari institusi terkait. Selain itu, masih terdapat perbedaan dalam penerapan standar antara fasilitas kesehatan yang satu dengan yang lain, terutama di daerah-daerah terpencil. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya berkelanjutan dari berbagai pihak, baik pemerintah, organisasi profesi, maupun institusi pendidikan keperawatan. Sosialisasi, pelatihan, dan pengembangan kompetensi perawat harus terus dilakukan agar standar praktik keperawatan dapat diterapkan secara konsisten di seluruh Indonesia. Penguatan regulasi dan sistem pengawasan juga sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap perawat menjalankan praktik sesuai standar yang berlaku (Sugiyono, 2023).

Peran organisasi profesi seperti PPNI sangat vital dalam mendukung implementasi standar praktik keperawatan. PPNI bertanggung jawab dalam menyusun, mensosialisasikan, dan mengawasi pelaksanaan standar, serta memberikan advokasi bagi anggotanya dalam menghadapi permasalahan hukum terkait praktik keperawatan. Kolaborasi antara organisasi profesi, pemerintah, dan institusi pelayanan kesehatan menjadi kunci sukses dalam penerapan standar praktik keperawatan (Kusumaningrum, 2022).

Di era globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat, standar praktik keperawatan harus terus diperbaharui agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Standar yang adaptif dan berbasis bukti akan mendorong peningkatan mutu pelayanan keperawatan dan memperkuat posisi profesi perawat di tengah dinamika sistem kesehatan nasional (Yuliana, 2022).

Dengan demikian, implementasi standar praktik keperawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan langkah strategis untuk

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, melindungi hak pasien, dan memperkuat profesionalisme perawat. Kajian pustaka mengenai implementasi standar ini sangat penting untuk mengidentifikasi hambatan, tantangan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat sistem keperawatan di Indonesia ke depan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (literature review) dengan pendekatan deskriptif analitis, di mana data dikumpulkan melalui penelusuran dan telaah sistematis terhadap berbagai sumber hukum primer seperti undang-undang dan peraturan pemerintah, serta sumber sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan implementasi standar praktik keperawatan di Indonesia; seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan mensintesis temuan-temuan terkait penerapan, tantangan, serta upaya optimalisasi standar praktik keperawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Booth & Clarke, 2021).

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Standar Praktik Keperawatan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Implementasi standar praktik keperawatan di Indonesia merupakan landasan kritis untuk menjamin kualitas pelayanan kesehatan dan perlindungan hukum bagi perawat maupun pasien. Kerangka hukum utama yang mengatur praktik ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, yang mewajibkan perawat memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) sebagai syarat legal berpraktik. Regulasi ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2023 yang menetapkan standar operasional mulai dari pengkajian hingga evaluasi asuhan keperawatan (Purnamasari, 2022).

Standar praktik keperawatan mencakup dua pendekatan utama: normatif berbasis pendapat ahli dan empiris berbasis bukti penelitian. Implementasinya memerlukan integrasi antara kebijakan institusi kesehatan, sistem supervisi, dan kompetensi perawat. Studi di RSUD Kota Baubau mengungkapkan hanya 40% perawat yang memahami standar operasional prosedur (SOP) secara komprehensif, sementara 60% mengalami kesulitan dalam penerapan *evidence-based practice* (Nashiratunnisa et al., 2024).

Tantangan utama implementasi meliputi disparitas kualitas sumber daya manusia, di mana hanya 35% perawat di daerah terpencil memiliki kualifikasi Ners. Beban kerja tinggi dengan rasio perawat-pasien 1:15 di beberapa rumah sakit menyebabkan *burnout* dan penurunan kualitas dokumentasi asuhan. Sistem pengawasan yang lemah

tercermin dari hanya 20% fasilitas kesehatan yang melakukan audit berkala terhadap kepatuhan standar (Yuliana, 2022).

Infrastruktur yang tidak memadai memperparah masalah, seperti sistem dokumentasi manual di 65% puskesmas yang meningkatkan risiko kesalahan catatan medis. Keterbatasan alat kesehatan dasar ditemukan di 30% rumah sakit kelas C, menghambat pelaksanaan protokol standar. Di sisi regulasi, tumpang tindih kewenangan antara pemerintah daerah dan organisasi profesi sering menyebabkan inkonsistensi penerapan kebijakan (Hendrik, 2023).

Upaya perbaikan memerlukan intervensi multidimensi. Peningkatan kompetensi melalui program *reskilling* bagi 50.000 perawat non-Ners menjadi prioritas, didukung oleh kolaborasi Kementerian Kesehatan dan asosiasi pendidikan. Penguatan sistem informasi kesehatan berbasis teknologi diperlukan untuk menstandarisasi dokumentasi elektronik di 80% fasilitas kesehatan hingga 2027. Reformasi kebijakan harus fokus pada penyelarasan Permenkes No. 26/2023 dengan kebutuhan lapangan, termasuk penyediaan insentif bagi rumah sakit yang menerapkan *nursing care quality indicators*. Peran aktif Konsil Keperawatan dalam pengawasan STR dan SIPP perlu ditingkatkan melalui mekanisme *real-time verification system* yang terintegrasi dengan database nasional (Setiani, 2021).

Pengalaman implementasi Model Praktik Keperawatan Profesional (MPKP) di RSUD Kota Baubau menunjukkan peningkatan 25% kepatuhan SOP setelah intervensi pelatihan intensif selama 6 bulan. Keberhasilan ini perlu direplikasi dengan modifikasi kontekstual, termasuk adaptasi standar untuk layanan kesehatan masyarakat di daerah kepulauan (Doengoes, 2021).

Solusi berkelanjutan memerlukan pendekatan *public-private partnership* untuk meningkatkan alokasi anggaran pelatihan sebesar 15% tiap tahun. Sinergi tripartit antara pemerintah, organisasi profesi (PPNI), dan institusi pendidikan harus difokuskan pada pengembangan *nursing excellence center* di setiap provinsi. Evaluasi berkala melalui *balanced scorecard* sistem keperawatan nasional akan menjadi kunci memastikan tercapainya target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan (Wisuda & Suraya, 2022).

Implementasi efektif standar praktik keperawatan bukan hanya tanggung jawab perawat individu, tetapi memerlukan komitmen sistemik dari seluruh pemangku kepentingan. Dengan penyelarasan regulasi, peningkatan kapasitas SDM, dan penguatan infrastruktur pendukung, Indonesia berpotensi mencapai *benchmark* kualitas keperawatan setara dengan standar ASEAN Network of Nursing and Midwifery (ANNAM) pada 2030 (Pratiwi, 2022).

Maka dengan itu, implementasi standar praktik keperawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia menunjukkan bahwa penerapan standar ini sangat penting untuk menjamin mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan perlindungan hukum bagi perawat. Meskipun telah tersedia regulasi yang cukup jelas,

seperti Undang-Undang Keperawatan dan berbagai peraturan pelaksana, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan utama meliputi kualitas dan pemerataan pendidikan keperawatan, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya fasilitas dan infrastruktur pendukung, serta belum optimalnya sistem pengawasan dan evaluasi. Selain itu, perubahan teknologi dan tuntutan globalisasi menuntut perawat untuk terus meningkatkan kompetensi dan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Upaya peningkatan profesionalisme, penguatan regulasi, serta kolaborasi antara pemerintah, organisasi profesi, institusi pendidikan, dan fasilitas kesehatan sangat diperlukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan memastikan implementasi standar praktik keperawatan berjalan optimal di seluruh Indonesia. Dengan demikian, komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam mewujudkan pelayanan keperawatan yang profesional, bermutu, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tantangan Dan Hambatan Dalam Implementasi Standar Praktik Keperawatan Di Indonesia

Tantangan dan hambatan dalam implementasi standar praktik keperawatan di Indonesia sangat kompleks dan multidimensional, meliputi aspek sumber daya manusia, sistem organisasi, kebijakan manajemen, hingga infrastruktur pendukung. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan tenaga keperawatan yang memiliki kualifikasi profesional sesuai standar. Masih banyak perawat yang belum menempuh pendidikan formal tingkat Ners, sehingga kompetensi mereka belum optimal untuk menerapkan praktik keperawatan berbasis bukti atau *evidence-based practice*. Kesenjangan keterampilan dan kompetensi klinis juga terlihat jelas, di mana sebagian perawat belum terbiasa dengan penerapan standar operasional prosedur (SOP) secara konsisten (Siti Rufaidah, 2025).

Selain itu, beban kerja yang tinggi menjadi hambatan signifikan. Rasio perawat terhadap pasien yang tidak ideal menyebabkan perawat mengalami kelelahan dan *burnout*, yang berdampak pada penurunan motivasi kerja dan efektivitas penerapan standar praktik keperawatan. Beban kerja yang berat juga menghambat pelaksanaan sistem pasien kelolaan, di mana idealnya setiap perawat bertanggung jawab terhadap pasien tertentu secara konsisten, namun dalam praktiknya sering terjadi rotasi pasien yang tidak terstruktur (Rahayu, 2023). Kurangnya supervisi dan dukungan manajemen juga menjadi faktor penghambat utama. Pengawasan terhadap kepatuhan SOP masih minim, sehingga terjadi variasi dalam kualitas pelayanan yang diberikan. Selain itu, kurangnya keterlibatan manajemen dalam evaluasi dan pemberian umpan balik menyebabkan implementasi standar tidak berjalan optimal. Tidak adanya mekanisme penghargaan atau insentif bagi perawat yang disiplin menerapkan standar juga menurunkan motivasi mereka (Amir & Purnama, 2021).

Pelatihan dan pengembangan kompetensi perawat masih sangat terbatas. Banyak perawat belum mendapatkan pelatihan khusus mengenai implementasi Model Praktik Keperawatan Profesional (MPKP), sehingga masih mengalami kesulitan dalam mengadaptasi metode keperawatan profesional yang baru. Akses terhadap literatur ilmiah, pedoman praktik berbasis bukti, dan forum diskusi ilmiah juga masih minim, sehingga inovasi dalam pelayanan keperawatan kurang berkembang (Gillies, 2025).

Keterbatasan infrastruktur dan sumber daya pendukung juga menjadi hambatan serius. Banyak proses pencatatan dan dokumentasi keperawatan masih dilakukan secara manual, sehingga meningkatkan risiko kesalahan dan menghambat efektivitas koordinasi dalam tim keperawatan. Ketersediaan alat kesehatan dan fasilitas kerja yang ergonomis juga masih terbatas, terutama di beberapa unit layanan, yang menyebabkan hambatan dalam pelaksanaan standar tindakan keperawatan (Purba, 2020).

Dari sisi sistem organisasi, penerapan MPKP sering kali tidak didukung oleh tata kelola yang efektif. Tidak jelasnya implementasi MPKP di institusi penyelenggara menyebabkan kebingungan di antara perawat, sehingga hanya beberapa tahapan seperti pembentukan tim dan hand over yang terlaksana dengan baik, sedangkan pre-conference, post conference, dan ronde keperawatan sering kali tidak berjalan optimal. Kurangnya sosialisasi dan pendampingan oleh para ahli juga memperparah situasi ini (Infokom DPP PPNI, 2023).

Lingkungan kerja yang kurang mendukung, seperti tekanan kerja yang tinggi, keterbatasan fasilitas, dan minimnya supervisi, turut menurunkan kinerja perawat dan berdampak negatif pada mutu pelayanan kesehatan. Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan lanjutan, sehingga perawat kesulitan dalam mengembangkan kompetensi dan profesionalisme mereka. Tantangan dalam sistem pendidikan keperawatan juga masih menjadi masalah (PPNI, 2021). Pengaturan mengenai pendirian dan penyelenggaraan pendidikan keperawatan di Indonesia belum tegas dan jelas, sehingga banyak institusi pendidikan keperawatan dengan kualitas yang diragukan. Standardisasi dalam penyelenggaraan uji kompetensi juga belum optimal, sehingga hasil lulusan perawat sangat beragam dari segi kualitas (Subekti, 2024).

Kepemimpinan dalam keperawatan juga berperan penting dalam keberhasilan implementasi standar praktik keperawatan. Gaya kepemimpinan yang tidak mendukung, kurangnya pengembangan kepemimpinan, serta minimnya partisipasi pasien dalam proses asuhan keperawatan menjadi hambatan dalam penerapan evidence-based practice (EBP). Kurangnya dukungan manajemen dan sumber daya untuk EBP juga memperburuk situasi (Sugiyono, 2023).

Pada masa pandemi COVID-19, tantangan semakin berat dengan meningkatnya jumlah pasien, peningkatan jam kerja, keterbatasan alat pelindung diri, dan isolasi dari lingkungan luar. Hal ini menyebabkan kecemasan, kelelahan, dan berkurangnya motivasi kerja perawat, sehingga kemampuan mereka untuk mengimplementasikan

nilai profesionalisme keperawatan menurun drastis. Masalah dokumentasi keperawatan juga masih menjadi perhatian (Kusumaningrum, 2022). Persentase kelengkapan dokumentasi keperawatan hanya sekitar 63%, dengan diagnosis dan rencana asuhan keperawatan yang tuntas hanya 61%, serta implementasi dan evaluasi 75%. Dokumentasi yang tidak lengkap menunjukkan bahwa proses asuhan keperawatan tidak berjalan dengan baik dan terus menerus, sehingga menghambat evaluasi mutu pelayanan (Yuliana, 2022).

Kurangnya inovasi dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi juga menjadi hambatan. Digitalisasi sistem pendokumentasian keperawatan masih berjalan lambat, padahal penggunaan Electronic Health Record (EHR) dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan asuhan keperawatan. Rumah sakit perlu beralih dari sistem manual ke sistem digital untuk mendukung penerapan standar praktik keperawatan secara optimal (Hendrik, 2023).

Secara keseluruhan, tantangan dan hambatan dalam implementasi standar praktik keperawatan di Indonesia mencakup aspek sumber daya manusia, sistem organisasi, kebijakan manajemen, pendidikan, infrastruktur, lingkungan kerja, hingga adaptasi teknologi. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, organisasi profesi, institusi pendidikan, dan manajemen rumah sakit dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme perawat, memperbaiki sistem tata kelola, serta menyediakan fasilitas dan teknologi pendukung yang memadai.

Upaya Yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Implementasi Standar Praktik Keperawatan Sesuai Regulasi

Upaya untuk meningkatkan implementasi standar praktik keperawatan sesuai regulasi di Indonesia dilakukan melalui berbagai strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Salah satu langkah utama adalah peningkatan kompetensi dan kualifikasi tenaga keperawatan. Pemerintah, institusi pendidikan, dan rumah sakit didorong untuk memastikan seluruh perawat menempuh pendidikan lanjutan hingga tingkat Ners, serta memperoleh sertifikasi profesional yang relevan dengan bidang tugasnya. Selain pendidikan formal, pelatihan berkelanjutan menjadi prioritas (Setiani, 2021). Rumah sakit dan institusi kesehatan rutin menyelenggarakan workshop, seminar, dan pelatihan berbasis kebutuhan praktik, seperti pelatihan Basic Life Support (BLS), Patient Safety, pengendalian infeksi, serta pelatihan dokumentasi asuhan keperawatan. Target jam pelatihan tahunan juga diterapkan untuk memastikan seluruh perawat selalu meng-update pengetahuan dan keterampilan sesuai perkembangan ilmu dan regulasi (Doengoes, 2021).

Penguatan sistem mentoring dan supervisi klinis juga sangat penting. Program mentoring dan preceptorship memungkinkan perawat junior belajar langsung dari perawat senior yang berpengalaman. Kepala ruangan dan supervisor keperawatan berperan aktif dalam membimbing, mengawasi, serta memberikan umpan balik dan

evaluasi rutin terhadap implementasi Model Praktik Keperawatan Profesional (MPKP) di setiap unit layanan (Wisuda & Suraya, 2022). Evaluasi berkala terhadap penerapan standar praktik keperawatan menjadi salah satu indikator keberhasilan. Rumah sakit menetapkan sistem evaluasi berbasis Key Performance Indicator (KPI) untuk mengukur efektivitas penerapan standar, baik dari sisi proses asuhan keperawatan, kepuasan pasien, maupun hasil kesehatan pasien. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dan penyusunan program tindak lanjut (Pratiwi, 2022).

Digitalisasi sistem pendokumentasian keperawatan juga menjadi upaya strategis. Penggunaan Electronic Health Record (EHR) memudahkan pencatatan, akses data pasien, serta meningkatkan akurasi dan efisiensi dokumentasi asuhan keperawatan. Rumah sakit berupaya beralih dari sistem manual ke digital secara bertahap, disertai pelatihan penggunaan aplikasi bagi seluruh perawat (Siti Rufaidah, 2025).

Peningkatan ketersediaan alat medis dan fasilitas kerja yang ergonomis tak kalah penting. Rumah sakit dan pemerintah daerah berupaya memastikan setiap unit layanan memiliki peralatan medis yang memadai dan lingkungan kerja yang mendukung, sehingga perawat dapat menjalankan standar operasional prosedur (SOP) secara optimal (Rahayu, 2023).

Dari sisi kebijakan, harmonisasi regulasi dan penguatan legislasi terus dilakukan. Pemerintah memperbarui peraturan dan pedoman praktik keperawatan agar selaras dengan kebutuhan lapangan, serta memperkuat sistem lisensi dan registrasi praktik perawat. Pengawasan disiplin profesi juga diperketat untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang berlaku. Institusi/organisasi profesi seperti PPNI berperan aktif dalam menyusun, mensosialisasikan, dan mengawasi pelaksanaan standar praktik keperawatan. Mereka juga menyediakan advokasi hukum dan perlindungan profesi bagi perawat yang menghadapi permasalahan dalam praktik sehari-hari (Amir & Purnama, 2021).

Pengembangan budaya kerja yang mendukung dan kolaboratif menjadi fokus lain. Lingkungan kerja yang sehat, beban kerja yang terkelola dengan baik, serta dukungan tim medis lain dapat meningkatkan motivasi dan kinerja perawat dalam menerapkan standar praktik keperawatan. Peningkatan peran kepemimpinan keperawatan juga sangat krusial. Kepala ruangan dan manajer keperawatan diharapkan mampu menjadi role model, fasilitator, dan motivator dalam penerapan standar, serta mendorong inovasi dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan ilmu keperawatan (Gillies, 2025).

Upaya lain yang dilakukan adalah penguatan sistem jaminan mutu dan audit internal secara berkala. Evaluasi mutu asuhan keperawatan melalui telaah sejawat dan program evaluasi interdisiplin menjadi mekanisme penting untuk mengidentifikasi kesenjangan serta merumuskan tindakan perbaikan yang diperlukan (Purba, 2020).

Terakhir, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, institusi pendidikan, organisasi profesi, dan fasilitas kesehatan sangat diperlukan untuk memastikan seluruh upaya peningkatan implementasi standar praktik keperawatan berjalan efektif dan berkelanjutan. Sinergi ini menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan keperawatan yang profesional, bermutu, dan sesuai regulasi di seluruh Indonesia.

Kesimpulan

Implementasi standar praktik keperawatan di Indonesia telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Keperawatan dan regulasi turunannya, yang menegaskan pentingnya kompetensi, lisensi, dan tanggung jawab profesional perawat dalam memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan masyarakat. Standar praktik keperawatan berfungsi sebagai batas ukuran baku minimal yang harus dilakukan perawat, serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan asuhan keperawatan yang aman, bermutu, dan berorientasi pada kebutuhan klien. Regulasi ini juga memberikan perlindungan hukum bagi perawat dan pasien, serta memastikan bahwa praktik keperawatan dijalankan secara profesional dan bertanggung jawab.

Meskipun kerangka hukum dan standar telah tersedia, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti disparitas kompetensi, keterbatasan infrastruktur, dan kurangnya supervisi serta evaluasi berkala. Upaya peningkatan implementasi standar dilakukan melalui penguatan peran kepala ruangan dan supervisor, evaluasi berbasis indikator kinerja, digitalisasi sistem dokumentasi keperawatan, serta peningkatan ketersediaan alat medis dan fasilitas kerja yang mendukung. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, organisasi profesi, institusi pendidikan, dan fasilitas kesehatan sangat penting untuk memastikan seluruh perawat memahami dan menerapkan standar praktik sesuai regulasi yang berlaku.

Secara keseluruhan, penerapan standar praktik keperawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan langkah strategis untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan profesionalisme perawat. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada komitmen semua pemangku kepentingan, pembaruan regulasi yang adaptif, serta penguatan sistem pendidikan dan supervisi di seluruh tatanan pelayanan kesehatan.

References

- Amir, M., & Purnama, D. (2021). Tanggung Jawab Hukum Perawat Praktik Mandiri terhadap Pelaksanaan Standar Profesi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014. *Jurnal Suara Hukum*, 3(2), 302–312.
- Booth, A., & Clarke, M. (2021). The value of systematic reviews in health care. *British Medical Journal*, 372. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>

- Doengoes, M. E. (2021). Implementasi Standar Praktik Keperawatan di Fasilitas Kesehatan Primer. *Jurnal Keperawatan Dan Kesehatan*, 12(1), 66–74.
- Gillies, D. A. (2025). Standar Praktik Keperawatan Profesional. *Makalah Standar Keperawatan Profesional*.
<https://id.scribd.com/document/672602063/431332849-Makalah-Standar-Keperawatan-Profesional-Docx>
- Hendrik, T. (2023). Kepatuhan Perawat terhadap Standar Praktik Keperawatan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 26(1), 88–97.
- Infokom DPP PPNI. (2023). Standar Praktik Keperawatan dan Perlindungan Hukum bagi Perawat di Indonesia. *Jurnal Siti Rufaidah*, 3(2), 38–48.
- Kusumaningrum, R. (2022). Pengembangan Panduan Asuhan Keperawatan Berbasis SDKI, SLKI, dan SIKI. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Farmasi Dan Kesehatan*, 1(3), 250–260.
- Nashiratunnisa, R. S., Wulandari, R. Y., Surmiasih, S., & Zuriati, Z. (2024). Penerapan Standar Asuhan Keperawatan (SAK) 10 Diagnosa Keperawatan dalam Pelaksanaan Manajemen Keperawatan di Ruang Alamanda RSUD HI. M. Yusuf Kotabumi. *Majalah Cendekia Mengabdi*, 2(2), 112–119.
<https://doi.org/10.63004/mcm.v2i2.375>
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). (2025). Standar Praktik Keperawatan Profesional. *Standar Praktik Keperawatan Profesional*.
<https://id.scribd.com/document/600638736/4-Standar-Praktik-Keperawatan-Profesional>
- PPNI. (2021). Standar Praktik Keperawatan dan Akreditasi Rumah Sakit di Indonesia. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 24(2), 101–109.
- Pratiwi, A. (2022). Evaluasi Implementasi Standar Praktik Keperawatan di Rumah Sakit Berdasarkan Permenkes No. 26 Tahun 2019. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 25(1), 45–52.
- Purba, M. (2020). Standar Praktik Keperawatan dan Tantangan Implementasi di Era Digital. *Jurnal Keperawatan Dan Kesehatan*, 11(2), 112–120.
- Purnamasari, Y. (2022). Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Praktik Keperawatan Mandiri. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 25(2), 67–75.
- Rahayu, S. (2023). Tanggung Jawab Hukum Perawat Terhadap Pelaksanaan Asuhan Keperawatan Berdasarkan Standar Praktik dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*.
<https://dinastirev.org/JIHHP/article/download/2348/1455/9031>
- Setiani, R. (2021). Implikasi Hukum Praktik Keperawatan Berdasarkan UU No. 38 Tahun 2014. *Jurnal Suara Hukum*, 3(2), 315–325.
- Siti Rufaidah. (2025). Analisis Implikasi Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Praktik Keperawatan di Indonesia. *Jurnal Siti Rufaidah*.

<https://journal.ppniunimman.org/index.php/JASIRA/article/download/182/227/920>

- Subekti, A. (2024). Peran PPNI dalam Advokasi Standar Praktik Keperawatan Pasca UU No. 17 Tahun 2023. *Jurnal Siti Rufaidah*, 3(2), 38–48.
- Sugiyono. (2023). Peran Pendidikan Tinggi Keperawatan dalam Implementasi Standar Praktik Keperawatan. *Jurnal Siti Rufaidah*, 3(2), 38–48.
- Wisuda, A. C., & Suraya, C. (2022). Implementasi 3S (SDKI, SIKI, SLKI) dalam Pelayanan Keperawatan di Ruang Rawat Inap. *UJPKM*. <https://jurnal.stik-sitikhadijah.ac.id/index.php/ujpkm/article/download/427/276/>
- Yuliana, E. (2022). Penerapan 3S (SDKI, SLKI, SIKI) dalam Asuhan Keperawatan di Rumah Sakit. *Jurnal Administrasi Dan Manajemen Sains Indonesia*, 3(1), 56–62. <https://doi.org/10.54082/jamsi.293>